



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGELOLAAN SAMPAH 2025 - 2026



Dibuat oleh:

**Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku "Peta Jalan (Roadmap) Pernyataan Aksi Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2025-2026" sebagai bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, efektif, dan partisipatif.

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki tantangan besar dalam mengelola sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Roadmap ini hadir sebagai panduan strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta dengan pendekatan berbasis ekonomi sirkular dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Buku ini menguraikan arah kebijakan, sasaran, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam periode 2025-2026 untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dalam penyusunannya, kami mengacu pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, serta memperhatikan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah di berbagai kota dunia.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi roadmap ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga roadmap ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat DKI Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH	6
A. Profil Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota	6
B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota.....	10
C. Sektor Usaha/Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota	12
D. Peran Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengelolaan Sampah.....	25
BAB III RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL 2025-2026	26
A. Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	26
B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota.....	28
C. Penataan Tempat Pemrosesan Akhir	29
D. Sektor Usaha/Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, dan Kafe) yang Mengelola Sampah Organik.....	30
E. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	31
F. Kerjasama dan Kemitraan	32
G. Pengawasan Pengelolaan Sampah	33
H. Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan.....	34
I. Rencana Kegiatan dan Target Pencapaian	35
J. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Program Makan Siang Gratis.....	54
BAB IV PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah di DKI Jakarta semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang pesat. Setiap harinya, ibu kota menghasilkan ribuan ton sampah dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, perkantoran, pasar, sekolah, dan sektor komersial lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan sampah dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air yang berkontribusi terhadap banjir, serta peningkatan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi. Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan benar juga dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang memperburuk perubahan iklim global.

Berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta koordinasi antar lembaga yang masih kurang optimal turut memperumit permasalahan ini. Infrastruktur yang tersedia, seperti tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas pengolahan sampah, dan sistem transportasi sampah, masih belum mampu mengimbangi laju produksi sampah yang tinggi. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya menyebabkan tingginya jumlah sampah campuran yang sulit untuk diolah kembali. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan pelaksanaan yang kurang efektif.

Akibatnya, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik, meningkatkan tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang kapasitasnya semakin terbatas. Dengan tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya, umur operasional TPA menjadi semakin pendek, berisiko menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih besar, seperti pencemaran air tanah, udara, serta menimbulkan bau yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, mendorong peran aktif masyarakat, serta memperkuat regulasi dan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efisien di DKI Jakarta.



Gambar 1. 1 Terbatasnya Daya Tampung TPST Bantargebang

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis, holistik, dan berkelanjutan guna memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup tidak hanya peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga edukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam pengolahan sampah, seperti insinerator ramah lingkungan dan pemanfaatan biokonversi, juga perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA yang semakin terbatas kapasitasnya.

Penyusunan peta jalan akselerasi pengelolaan sampah menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan. Peta jalan ini akan memberikan panduan bagi pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara lebih terarah, inovatif, dan berbasis teknologi. Melalui kebijakan yang jelas dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dapat lebih terstruktur, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup, berupaya mengembangkan strategi komprehensif untuk mempercepat pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Permasalahan sampah yang semakin meningkat menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang yang efektif. Oleh karena itu, peta jalan ini disusun sebagai pedoman utama dalam

merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis data, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan dalam peta jalan ini mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Salah satu langkah strategis yang diutamakan adalah peningkatan jumlah dan kualitas Bank Sampah, baik di tingkat unit maupun induk, sehingga dapat lebih efektif dalam mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme daur ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) juga menjadi prioritas guna mempercepat proses pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat masyarakat sebelum akhirnya masuk ke sistem pengelolaan yang lebih besar.

Penerapan peta jalan ini juga terintegrasi dengan berbagai program sosial dan edukatif, seperti pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis, di mana sisa makanan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk mengurangi limbah organik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, peningkatan jumlah Sekolah Adiwiyata juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dengan tujuan membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui edukasi dan praktik langsung di lingkungan sekolah. Berbagai inisiatif lainnya, seperti pelibatan komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis kawasan, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan sampah, serta insentif bagi masyarakat yang aktif dalam memilah dan mendaur ulang sampah, turut dimasukkan dalam peta jalan ini agar sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta semakin efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Target utama yang ingin dicapai dalam periode 2025-2026 mencakup beberapa aspek krusial yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama adalah pengurangan signifikan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Untuk mencapai target ini, diperlukan berbagai upaya konkret, seperti peningkatan fasilitas pemilahan sampah di sumbernya, penyediaan insentif bagi masyarakat yang aktif melakukan pemilahan, serta pengembangan kebijakan yang mendorong industri untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dalam produksi dan distribusi barang.

Selain itu, peningkatan efisiensi dalam proses daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah organik maupun anorganik menjadi salah satu prioritas utama dalam peta jalan ini. Sampah organik yang selama ini terbuang dan menumpuk di TPA dapat diolah menjadi pupuk

kompos, Pakan Maggot atau diubah menjadi energi melalui teknologi biodigester, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat lebih dioptimalkan melalui fasilitas daur ulang yang lebih modern dan bekerja sama dengan Industri Daur Ulang. Dalam mendukung langkah ini, pemerintah DKI Jakarta juga berencana meningkatkan jumlah dan kapasitas Bank Sampah serta memperluas jaringan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam proses pengelolaan sampah secara mandiri.

Penguatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih masif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar. Program-program berbasis masyarakat, seperti Sekolah Adiwiyata, Bank Sampah, dan TPS3R, juga akan diperluas untuk memastikan bahwa perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten di semua lapisan masyarakat.

Selain peran masyarakat, optimalisasi keterlibatan sektor swasta terutama Industri Daur Ulang dan komunitas seperti peternak maggot atau pengelola sampah organik juga menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah. Sektor industri dan bisnis didorong untuk mengembangkan inovasi dalam pengurangan limbah, seperti penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dari produk yang mereka hasilkan. Sementara itu, komunitas lokal dan organisasi lingkungan diberikan peran lebih besar dalam menjalankan program pengelolaan sampah berbasis kawasan, termasuk melalui sistem kemitraan dengan pemerintah daerah.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah di DKI Jakarta dapat tertangani dengan lebih baik. Implementasi peta jalan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, dengan pengelolaan sampah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan, DKI Jakarta dapat berkembang menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bagi seluruh warganya.

Sebagai bagian dari implementasi peta jalan ini, Jakarta Utara dipilih sebagai kota percontohan dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, termasuk tantangan lingkungan yang

dihadapi, tingginya jumlah produksi sampah harian, serta potensi besar untuk menerapkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah. Melalui pilot project ini, berbagai inisiatif akan diuji coba secara komprehensif guna mengembangkan model pengelolaan yang lebih efektif dan dapat direplikasi di wilayah lain. Salah satu fokus utama dalam proyek percontohan ini adalah peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, termasuk penguatan sistem Bank Sampah, baik di tingkat unit maupun induk, yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah bernilai ekonomi. Selain itu, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) akan diperbanyak dan dioptimalkan agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya, sehingga dapat mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di samping itu, proyek ini juga mencakup penerapan teknologi modern dalam proses pemilahan dan daur ulang sampah, seperti pemanfaatan sensor otomatis untuk memilah sampah berdasarkan jenis material, serta penggunaan teknologi biokonversi dan biodigester untuk mengolah limbah organik menjadi energi atau pupuk yang bernilai ekonomi.

Selain pendekatan teknologi dan infrastruktur, peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proyek ini. Berbagai program edukasi dan sosialisasi akan dilakukan untuk mendorong masyarakat Jakarta Utara agar lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan sektor swasta, inisiatif seperti Sekolah Adiwiyata, pelatihan daur ulang bagi UMKM, serta kampanye digital tentang pentingnya pengurangan sampah plastik akan digencarkan. Partisipasi masyarakat dalam skema insentif berbasis sampah, seperti penukaran sampah dengan sembako atau diskon layanan tertentu, juga akan diperkenalkan untuk meningkatkan motivasi dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik.

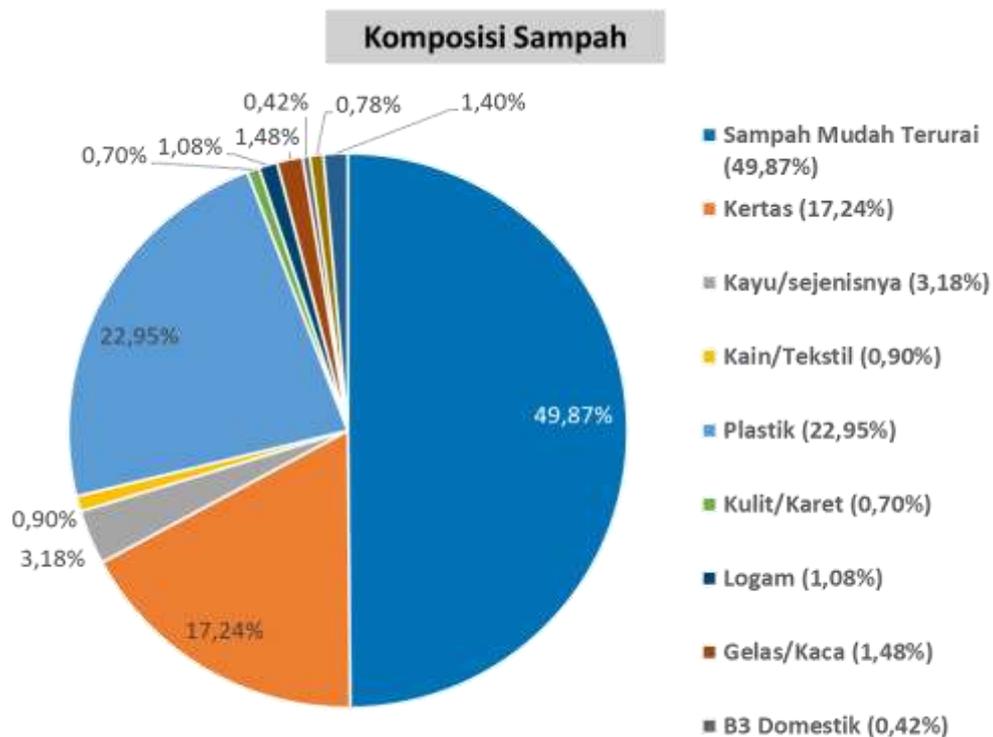
Melalui proyek percontohan ini, diharapkan dapat diperoleh model pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterapkan secara luas di seluruh wilayah Jakarta. Data dan pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan pilot project ini akan menjadi dasar dalam menyempurnakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat provinsi, sehingga menciptakan sistem yang lebih efisien, bersih, dan ramah lingkungan. Lebih jauh, keberhasilan Jakarta Utara dalam menerapkan pengelolaan sampah berkelanjutan juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sehingga dapat membantu mempercepat upaya nasional dalam mengatasi permasalahan sampah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

BAB II

KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

A. Profil Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota

Berdasarkan data di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 3.171.247,45 ton per tahun atau 8.664,61 ton per hari dengan trend dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sampah yang dihasilkan tersebut didominasi oleh sampah mudah terurai sebanyak 49,87% diikuti dengan Plastik sebesar 22,95% dan kertas sebesar 17,24%, dengan komposisi terbesar berasal dari sampah rumah tangga, komersial, dan industri.



Gambar 2. 1. Komposisi Sampah

Berbagai Upaya pengelolaan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai metode pengelolaan yang telah diterapkan, termasuk pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), daur ulang, komposting, serta pengolahan melalui fasilitas seperti TPS3R, TPST, dan RDF Plant. Upaya pengelolaan sampah yang dilakukan dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1. Pengelolaan Sampah di Hulu

Pengelolaan sampah di Hulu terdiri dari beberapa program, yakni:

- a. Pengelolaan Sampah Lingkup RW (KuPiLah/Kurangi-Pilah-Olah)
- b. Penggerakkan Sirkular Ekonomi dengan Bank Sampah
- c. Model Area Jakarta Recycle Center di Pesanggrahan
- d. Pengendalian Sampah Plastik Sekali Pakai (KBRL)
- e. Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri
- f. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Terjadwal
- g. Pengolahan Sampah Mudah Terurai (Organik) seperti Komposting, Maggot (BSF), dan Ecoenzyme.



Gambar 2. 2 Pengolahan Sampah Organik dengan Rumah Maggot

2. Pengelolaan Sampah di Tengah

Pengelolaan sampah di Tengah terdiri dari beberapa program, yakni:

- a. Pengelolaan TPS dan TPS3R

Kapasitas TPS3R yang terbangun dari tahun 2022 sampai saat ini antara 25 – 50 ton per harinya.



Gambar 2. 3 TPS 3R Siaga

b. Pengelolaan Sampah di Badan Air

Pengelolaan sampah di Badan air di antaranya pembangunan dan pengoperasian saringan sampah di TB. Simatupang dengan kapasitas 20 ton perhari dan direncanakan di Pesanggrahan dengan kapasitas 15 ton perhari



Gambar 2. 4 Sungai Ciliwung Segmen TB. Simatupang

c. Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah/RDF Plant

RDF Plant di dalam Kota Rorotan yang sedang dalam tahap uji coba dan target kapasitas pengolahan sebesar 2.500 ton per hari

3. Pengelolaan Sampah di Hilir

Pengelolaan sampah di Hilir terdiri dari beberapa program, yakni:

a. Pembangunan RDF Plant

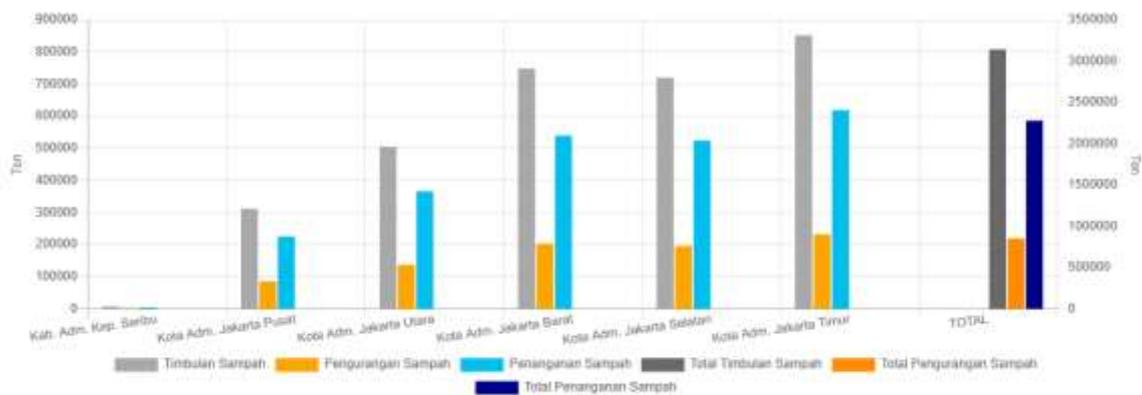
RDF Plant Bantargebang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.000 ton per hari



Gambar 2. 5 RDF Plant Bantargebang

b. Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)

Kapasitas pengolahan sampah sampai dengan 100 ton perhari dengan output Listrik sebesar 700KW yang digunakan untuk keperluan internal



Gambar 2. 6 Efektivitas Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Meskipun beberapa program seperti bank sampah dan pemilahan sampah dari sumber telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena tingkat partisipasi masyarakat yang beragam dan keterbatasan fasilitas pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi ketergantungan pada TPA.

B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota

Fasilitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta terdiri dari berbagai jenis yang berfungsi untuk mengelola dan memproses sampah sesuai dengan skala dan jenisnya, termasuk Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk (BSI), Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Setiap fasilitas ini memiliki peran yang berbeda dalam rantai pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir. Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah yang bernilai ekonomi, memungkinkan masyarakat untuk menukarkan sampah anorganik seperti plastik dan kertas dengan insentif tertentu. Sementara itu, TPS3R berperan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular dengan memfasilitasi pemilahan sampah di tingkat komunitas serta pengolahan limbah organik menjadi kompos atau sumber energi.

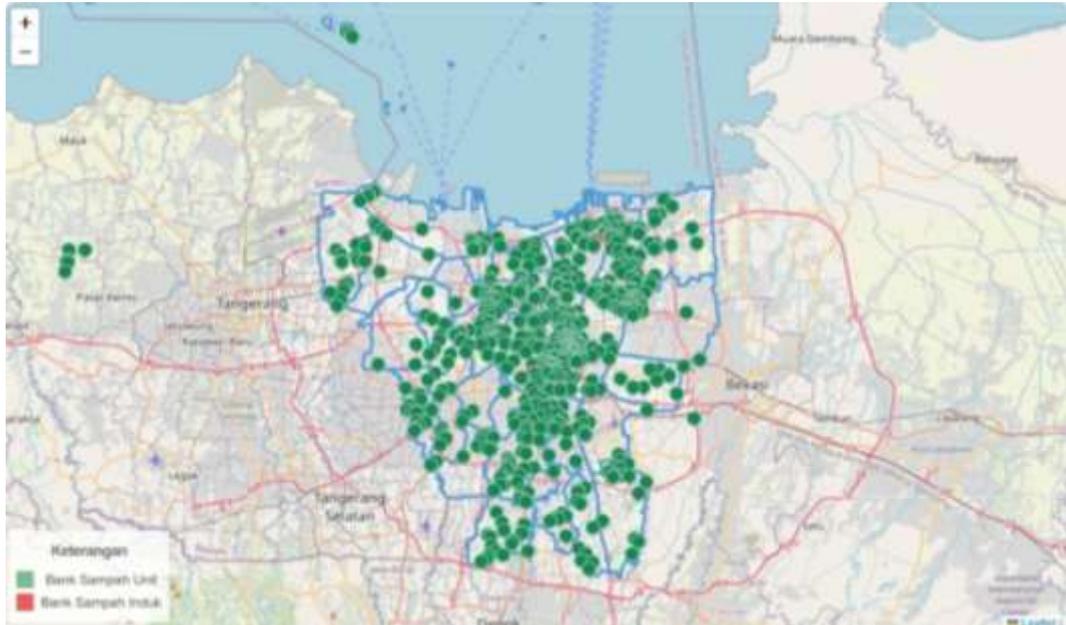
Di sisi lain, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) beroperasi dengan skala yang lebih besar, memungkinkan pengelolaan sampah dengan berbagai metode, termasuk teknologi waste-to-energy (WTE) seperti PLTSa untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang lebih bermanfaat. Namun, meskipun berbagai fasilitas ini telah beroperasi, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal kapasitas pengolahan yang sering kali belum sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai fasilitas utama dalam menampung sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, semakin terbebani akibat volume sampah yang terus meningkat. Hal ini diperparah dengan keterbatasan lahan yang menyebabkan daya tampung TPA semakin menipis, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir ini.

Jumlah TPS dan TPS 3R di DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah sebanyak total 1.176 yang terbagi dalam beberapa jenis seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1. Jumlah TPS dan TPS 3R di DKI Jakarta

Wilayah	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	TPS 3R	Total
Jakarta Barat	31	3	1	171	2	207
Jakarta Pusat	14	22	3	98	2	139
Jakarta Selatan	25	75	4	85	3	190
Jakarta Timur	38	105	13	205	7	367
Jakarta Utara	10	47	1	202	5	262
Kepulauan Seribu	0	-	-	9	3	11
Total	118	252	22	770	22	1184

Selain TPS & TPS 3R, terdapat juga Bank Sampah yang totalnya mencapai 3.983 bank sampah di DKI Jakarta tahun 2024, dengan sebaran sebagai berikut:



Gambar 2. 7. Bank Sampah

Data jumlah pengelolaan sampah ini menjadi elemen kunci dalam memahami sejauh mana infrastruktur yang ada mampu memenuhi kebutuhan wilayah. Dengan adanya pemetaan yang akurat dan berbasis data, pemerintah dapat mengidentifikasi titik-titik yang masih memerlukan penguatan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan infrastruktur baru. Selain itu, modernisasi teknologi dalam fasilitas-fasilitas ini juga perlu dilakukan guna meningkatkan efisiensi pengolahan dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, strategi pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di DKI Jakarta akan difokuskan pada peningkatan kapasitas Bank Sampah dan TPS3R untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas, perluasan TPST dengan teknologi pemrosesan sampah yang lebih canggih, serta pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA melalui penerapan kebijakan Zero Waste City secara bertahap. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus mendukung pencapaian target pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di ibu kota.

C. Sektor Usaha/Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota

Usaha di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah organik di DKI Jakarta, terutama dari sisa makanan dan bahan mentah yang terbuang. Dengan tingginya volume sampah organik yang dihasilkan, diperlukan strategi khusus untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa pelaku usaha Horeka telah menerapkan berbagai metode pengolahan sampah organik, seperti composting untuk menghasilkan pupuk organik, biokonversi dengan maggot Black Soldier Fly (BSF) untuk pakan ternak, serta teknologi lainnya yang mendukung pengurangan limbah secara efektif. Namun, masih banyak usaha Horeka yang belum memiliki sistem pengelolaan yang optimal, sehingga diperlukan dorongan melalui regulasi, insentif, dan kemitraan dengan pihak ketiga guna meningkatkan praktik pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan di sektor ini.

Beberapa hotel yang telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan laporan pengelolaan sampah di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Daftar Hotel

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
1	Ayaka Suites (PT. Wisma Mitra Abadi)									Belum Lapor
2	Cabin Hotel (PT Kartika Jaya Abadi)									Belum Lapor
3	Cv. Avissa Jaya Abadi - Avissa Suites									Belum Lapor
4	Discovery Hotel & Convention Ancol (PT Marina Ancol Green Hotel)									Belum Lapor
5	Double Tree By Hilton Jakarta - Diponegoro (PT Nurtirta Nusa Lestari)									Belum Lapor
7	Grand G7 Hotel Pasar Baru									Belum Lapor
8	Grand Kemang Hotel (PT Kemang Jaya Raya)									Belum Lapor

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilih	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
9	Grand Sahid Jaya (PT Hotel Sahid Jaya)				Belum Lapor					
10	Hotel 678 Cawang (PT Pondok Tirta Sentosa)				Belum Lapor					
11	Hotel 678 Kemang (PT Pondok Tirta Sentosa)				Belum Lapor					
12	Hotel Akmani (PT Grahasari Suryajaya)				Belum Lapor					
13	Hotel Alia Heritage Pasar Baru (PT Hotel Sentraria Pasar Baru)				Belum Lapor					
14	Hotel Alia Pasar Baru (PT. Hotel Sentraria Alia Pasar Baru)				Belum Lapor					
15	Hotel Alila SCBD				Belum Lapor					
16	Hotel Amaris Pasar Baru (PT.				Belum Lapor					

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
	Mars Graha Lestari)									
17	Hotel Arosa (PT Menara Tegar Sejati)				Belum Lapor					
18	Hotel Aryaduta Jakarta (PT Lippo Karawaci)				Belum Lapor					
19	Hotel Aston Priority Simatupang (PT Nusa Pratama Property)				Belum Lapor					
20	Hotel Bintang Wisata Mandiri (PT Bintang Wisata Ma				Belum Lapor					
21	Hotel Borobudur Jakarta (PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk)				Belum Lapor					
22	Hotel Diradja (PT. Puro Sembilan Sejahtera)				Belum Lapor					

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilih	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
23	Hotel Fave Cideng (PT. Robina Putra Perkasa)									Belum Lapor
24	Hotel Fave Pasar Baru (PT. Wisana Matra Karya)									Belum Lapor
25	Hotel Gran Mahakam (PT Mahakam Eka Graha)									Belum Lapor
26	Hotel Gran Melia Jakarta									Belum Lapor
27	Hotel Gren Alia Prapatan (PT Mulia Naga Lestari)									Belum Lapor
28	Hotel Harris Tebet (PT. Java Paradise Island) - sekarang menjadi hotel citylog									Belum Lapor
29	Hotel Ibis Budget Cikini (PT Hotel Cikini Realty)									Belum Lapor

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
30	Hotel Ibis Budget Menteng (PT. Jakarta Setiabudi I)	Lapor	Ya	Tidak	6967	4980	1987	PT Fino Jaya Mandiri		Belum dievaluasi
31	Hotel Ibis Jakarta Harmoni (PT.Rekso Asia Developm	Lapor	Ya	Ya	Tidak Input Data			CV Pandawa Mandiri		Belum dievaluasi
32	Hotel Ibis Jakarta Senen (PT Tasani Artha Niaga)	Belum Lapor								
33	Hotel Ibis Styles (PT Loka Asri)	Belum Lapor								
34	Hotel Ibis Tamarin (PT Tamarindo Nusa Hotel)	Belum Lapor								
35	Hotel Kalisma (PT. Senen Indah Plaza)	Belum Lapor								
36	Hotel Mandarin Oriental Jakarta	Belum Lapor								
37	Hotel Manhattan (PT. Manhattan Hotel Casablanca)	Belum Lapor								

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
38	Hotel Maxone Kramat (PT Asia Graha Utama)	Belum Lapor								
39	Hotel Menara Peninsula (PT Menara Peninsula)	Belum Lapor								
40	Hotel Mercure Convention Center Ancol (PT. Metropolitan Realty International)	Lapor	Ya	Ya	Tidak Input Data			PT Putra Mulya Berseri	Belum dievaluasi	
41	Hotel Mercure Gatot Subroto (PT Graha Gatsu Lestari)	Lapor	Tidak	Tidak	Tidak Input Data			Belum dievaluasi		
42	Hotel Mulia Senayan (PT Mulia Intanlestari)	Belum Lapor								
43	Hotel Patra Comfort Jakarta (PT Patra Jasa)	Lapor	Tidak Input Data							
44	Hotel POP Pasar Baru (PT. Abdael Prima)	Belum Lapor								

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
45	Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta (PT. Grahawita Santika)									Belum Lapor
46	Hotel Santika TMII (PT Utama Power Data)									Belum Lapor
47	Hotel Sari Pacific (PT Sariarthamas Hotel Intenational)									Belum Lapor
48	Hotel Senen Indah (PT. Hotel Sentraria Alia Senen)									Belum Lapor
49	Hotel Shangri-La Jakarta (PT Swadharma Kerry Satya)									Belum Lapor
50	Hotel Sotis Kemang (PT. Sungai Mas Propertindo)									Belum Lapor
51	Hotel Studio One (Pt Studio One)									Belum Lapor

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
52	Hotel Sunlake (PT Sunter Lakeside Hotel, Tbk)	Belum Lapor								
53	Hotel The Acacia Jakarta	Belum Lapor								
54	Hotel The Dharmawangsa Jakarta (PT Puri Dharmawangsa)	Belum Lapor								
55	Hotel The Ritz-Carlton Jakarta (PT Mutiara Permata Mulia)	Lapor	Tidak	Tidak	Tidak Input Data			Belum dievaluasi		
56	Hotel Veranda (PT. Graha Pakubuwono Kusuma)	Belum Lapor								
57	Hotel Whiz Cikini (PT. Estrella Lima Indonesia)	Belum Lapor								
58	Intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel & Residence (PT Pondok Indah Hotel)	Belum Lapor								

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
59	JS Luwansa Hotel & Convention Center	Belum Lapor								
60	Mercure Jakarta Cikini (PT. Imesco Sejahtera Utama)	Belum Lapor								
61	Millenium Hotel Sirih Jakarta (PT Millenium Hotel Sirih Jakarta)	Belum Lapor								
62	Novotel Jakarta Cikini									
63	Park Hotel Cawang Jakarta (PT PP Properti, Tbk)	Lapor	Tidak	Tidak	Tidak Input Data			PT Samhana Indah	Belum dievaluasi	
64	PT Buana Mitra Usaha-Hotel Classic	Belum Lapor								
65	PT Graha Maju Bersama (Hotel Ibis Styles Jakarta Simatupang)	Belum Lapor								
66	PT Lingga Hampan Krida	Belum Lapor								

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
	(Hotel Atlet Century Park)									
67	PT Ramayana Makmur Sentosa - Mercure Hotel Jakarta Sabang	Lapor	Tidak	Tidak	Tidak Input Data			PT Putri Adinda Cahaya	Belum dievaluasi	
68	PT Yudha Cipta Sarana - Hotel Cipta	Belum Lapor								
69	PT. Global Trimitra Griya	Belum Lapor								
70	PT. Graha Kasih Sejahtera (Amaris Hotel Juanda)	Belum Lapor								
71	PT. Karya Cipta Hotelindo (Hotel Grand Tjokro)	Belum Lapor								
72	PT. Nusaplaza International Hotel (Double Tree Kemayoran)	Lapor	Tidak	Ya	Tidak Input Data			Belum dievaluasi		
73	Ra Kondotel Service_RA Suites Simatupang	Belum Lapor								

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilih	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
74	Smart Hotel (PT. Bestland Nusantara)				Belum Lapor					
75	Swissbel-hotel Pondok Indah (PT Pondok Indah Tower)				Belum Lapor					
76	Swissbel-hotel Pondok Indah (PT Pondok Indah Tower)				Belum Lapor					
77	Teraskita Hotel Jakarta (PT Waskita Karya Realty)				Belum Lapor					
78	Teraskita Hotel Jakarta (PT Waskita Karya Realty)				Belum Lapor					
79	The Hermitage Menteng (PT Menteng Heritage)				Belum Lapor					
80	The Hermitage Menteng (PT Menteng Heritage)				Belum Lapor					

No	Perusahaan	Keterangan Pelaporan	Wadah Sampah Sudah Terpilah	TPS Terpilah	Jumlah Sampah (kg)			Pihak Pengangkut Sampah	Nilai LP	Status Ketaatan
					Dihasilkan	Diolah	Diangkut			
81	Yello Hotel Manggarai (PT Sahari Sukses Sejahtera)	Belum Lapor								
84	Hotel & Apartemen Mega Kuningan (PT Bahana Semesta Citra Nusantara)	Belum Lapor								

D. Peran Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta merupakan tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk industri, bisnis, pendidikan, serta komunitas yang aktif dalam inisiatif pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Sektor industri dan bisnis memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas daur ulang, edukasi lingkungan bagi masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Selain itu, banyak perusahaan yang mulai menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mendesain ulang produk agar lebih mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai.

Di sektor pendidikan, universitas dan sekolah turut serta dalam mendukung pengelolaan sampah dengan melakukan penelitian tentang inovasi teknologi pengolahan limbah, mengembangkan metode pemanfaatan kembali sampah organik dan anorganik, serta mengadakan berbagai kampanye kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar dan mahasiswa dapat memiliki pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta menerapkan kebiasaan hidup yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran krusial dalam menggerakkan program berbasis masyarakat, seperti pembentukan bank sampah yang mendorong masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah, kampanye pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum, serta inisiatif pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui gerakan penggunaan tas belanja kain dan sedotan ramah lingkungan. Dengan semakin banyaknya komunitas yang terlibat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab semakin meningkat, sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan adanya pemetaan keterlibatan setiap sektor dalam pengelolaan sampah dalam bentuk spasial, dapat diidentifikasi area-area yang telah memiliki dukungan pengelolaan sampah yang baik, serta wilayah yang masih memerlukan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Data ini sangat berguna untuk merancang kebijakan yang lebih efektif serta mengoptimalkan distribusi sumber daya guna mencapai target pengelolaan sampah yang lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat di DKI Jakarta.

BAB III

RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL 2025-2026

Peta jalan akselerasi pengelolaan sampah ini menetapkan cakupan dan batasan wilayah yang menjadi fokus utama dalam program percepatan pengelolaan sampah di DKI Jakarta, mencakup seluruh wilayah provinsi hingga tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Selain itu, peta jalan ini juga menyoroti sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, usaha Horeka, serta fasilitas publik. Dengan batasan yang jelas, program akselerasi ini dapat difokuskan pada wilayah dengan tingkat produksi sampah tinggi dan infrastruktur pengelolaan yang masih perlu diperkuat. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah intervensi yang dirancang dapat memberikan dampak maksimal dalam mengurangi beban sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, strategi yang digunakan mencakup tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah, optimalisasi kebijakan melalui regulasi dan insentif, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif dalam pengurangan dan pemilahan sampah. Ilustrasi pendukung, seperti peta distribusi fasilitas dan diagram alur pengelolaan sampah, akan membantu memperjelas implementasi strategi ini. Selain itu, penyusunan target dan rencana kegiatan dalam bentuk tabel akan memberikan gambaran konkret tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam periode 2025-2026, sehingga memudahkan pemantauan serta evaluasi capaian program secara berkala.

A. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Saat ini, kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah mengatur berbagai aspek, mulai dari upaya pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumber, hingga pengolahan dan pembuangan akhir yang lebih berkelanjutan. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah, seperti kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, kewajiban pemilahan sampah oleh rumah tangga dan pelaku usaha, serta penguatan sistem persampahan berbasis komunitas. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah, seperti sistem digitalisasi pemantauan sampah, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan efektivitas daur ulang, serta

penggunaan metode waste-to-energy untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA). Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat yang belum merata, keterbatasan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, serta mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan program pengelolaan sampah.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbagai regulasi telah ditetapkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Landasan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, peraturan pemerintah, serta berbagai peraturan daerah dan gubernur yang secara spesifik mengatur aspek pengelolaan sampah di wilayah tertentu. Adapun peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam kebijakan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019
4. Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
6. Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
7. Peraturan Gubernur No. 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah (Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022)
8. Peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039)
9. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
10. Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
11. Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah

12. Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
13. Keputusan Gubernur Nomor 1593 Tahun 2021 Tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu

Keberhasilan implementasi kebijakan sebelumnya menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi kebijakan baru untuk periode 2025-2026. Sejumlah pencapaian telah diraih, seperti peningkatan jumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah, penurunan timbulan sampah plastik akibat regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam berbagai inisiatif pengelolaan sampah. Ke depan, kebijakan yang akan diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas modern, tetapi juga pada optimalisasi sistem pengumpulan dan transportasi sampah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan dari sumber. Insentif berbasis kepatuhan, seperti reward bagi individu atau komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah, juga akan diperkuat untuk meningkatkan partisipasi publik. Dengan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta dapat berjalan lebih efektif, mengurangi beban sampah di TPA, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta, pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah baru yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Infrastruktur tambahan ini mencakup perluasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang akan dilengkapi dengan sistem pengolahan berbasis teknologi canggih, seperti biodigester untuk mengolah sampah organik menjadi energi, serta mesin pencacah dan pemilah otomatis untuk meningkatkan efisiensi daur ulang sampah anorganik. Selain itu, pemerintah juga akan membangun lebih banyak Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas, di mana masyarakat

dapat berpartisipasi aktif dalam memilah, mendaur ulang, dan mengolah sampah di tingkat lokal.

Di samping itu, peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) juga menjadi salah satu fokus utama dalam proyek ini. TPA yang ada akan diperbarui dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti metode sanitary landfill yang lebih efektif dalam mengelola limbah serta sistem pengolahan gas metana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga berencana untuk mengintegrasikan teknologi waste-to-energy (WTE), yang memungkinkan sampah diubah menjadi energi listrik melalui proses pembakaran yang terkendali. Untuk menentukan lokasi dan skala pembangunan fasilitas baru ini, pemerintah melakukan analisis mendalam berdasarkan estimasi kapasitas pengolahan sampah yang dibutuhkan, data timbulan sampah harian, serta tingkat pengolahan sampah yang telah berjalan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah diharapkan dapat mengakomodasi lonjakan produksi sampah akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi, sekaligus secara signifikan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kebersihan kota tetapi juga mendukung target keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

C. Penataan Tempat Pemrosesan Akhir

Saat ini, beberapa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di DKI Jakarta mengalami kelebihan kapasitas akibat volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang semakin padat. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air tanah akibat rembesan lindi—cairan yang berasal dari proses pembusukan sampah dan dapat mengandung bahan kimia berbahaya—serta peningkatan emisi gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik juga meningkatkan risiko longsor sampah, yang dapat membahayakan pekerja di TPA serta masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Masalah ini semakin kompleks dengan keterbatasan lahan untuk ekspansi TPA baru, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan inovatif agar TPA yang ada dapat bertahan lebih lama serta memberikan dampak negatif yang lebih minimal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi peningkatan pengelolaan TPA akan difokuskan pada penerapan metode sanitary landfill dan controlled landfill guna memastikan pengolahan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Dalam metode

sanitary landfill, sampah akan ditimbun secara berlapis dan setiap lapisan akan ditutup dengan tanah atau bahan penutup lainnya untuk mengurangi bau, mencegah berkembangnya vektor penyakit, serta mengendalikan emisi gas berbahaya. Sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi pengelolaan lindi yang lebih modern, seperti sistem drainase bawah tanah untuk menampung dan mengolah cairan limbah sebelum mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah akan dioptimalkan dengan sistem penangkapan dan konversi energi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik atau bahan bakar alternatif. Sementara itu, dalam metode controlled landfill, proses penimbunan sampah dilakukan dengan lebih terkontrol, di mana pemadatan dan perataan sampah dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko longsor serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Dengan penerapan kedua metode ini, diharapkan dampak lingkungan dari TPA dapat diminimalkan, umur operasionalnya dapat diperpanjang, dan sistem pengelolaan sampah di Jakarta menjadi lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mendukung visi kota yang lebih bersih dan sehat di masa depan.

Rencana Fasilitas Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

tabel 3. 1. Rencana Fasilitas Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

No	Rencana Infrastruktur Penanganan Sampah	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	Pusat Olah Organik (POO Pilot Project)	Jakarta Barat	2025 (APBDP)
2	Pusat Olah Organik (POO Skala Kota/Kab)	Jakarta Barat 1 Lokasi	2026
		Jakarta Selatan 1 Lokasi	2026
		Jakarta Utara 1 Lokasi	2026
		Jakarta Timur 1 Lokasi	2026
		Jakarta Pusat 1 Lokasi	2026
		Kepulauan Seribu 1 Lokasi	2026
3	TPS 3R	5 Lokasi (Tahap Perencanaan)	2026

D. Sektor Usaha/Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, dan Kafe) yang Mengelola Sampah Organik

Sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) merupakan salah satu penyumbang utama sampah organik dan anorganik di DKI Jakarta, dengan jumlah timbulan yang cukup besar setiap harinya. Besarnya volume sampah yang dihasilkan dari sektor ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsumsi, baik dalam penyediaan makanan dan minuman bagi pelanggan maupun dalam proses operasional bisnis itu sendiri. Sampah organik yang dihasilkan terutama berasal dari sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi,

limbah dapur seperti potongan sayuran, buah, serta tulang hewan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mempercepat pembentukan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Sementara itu, sampah anorganik yang didominasi oleh kemasan plastik, kertas, dan kaca dari produk makanan dan minuman sering kali berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa melalui proses daur ulang yang memadai. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari sektor ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta mengelolanya dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi pengurangan sampah di sektor Horeka akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan sampah organik dan pengurangan sampah anorganik. Dalam pengelolaan sampah organik, metode composting akan diterapkan untuk mengubah limbah makanan menjadi pupuk yang dapat digunakan kembali dalam sektor pertanian atau penghijauan kota. Selain itu, teknologi biokonversi dengan memanfaatkan larva Black Soldier Fly (BSF) juga menjadi solusi inovatif, di mana sisa makanan dapat diolah menjadi pakan ternak atau bahan baku pupuk organik dengan proses yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan sampah anorganik, upaya pengurangan akan difokuskan pada pembatasan penggunaan kemasan sekali pakai, seperti plastik dan styrofoam, dengan menggantinya menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan berbahan biodegradable atau reusable. Program takeback juga akan diterapkan untuk meningkatkan daur ulang kemasan, di mana produsen serta pelaku usaha Horeka bertanggung jawab dalam mengelola limbah kemasan yang mereka hasilkan. Program ini memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan kemasan kosong ke tempat usaha, sehingga dapat dikumpulkan, dipilah, dan didaur ulang dengan lebih sistematis. Dengan adanya regulasi yang ketat serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, diharapkan langkah-langkah ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah sektor Horeka secara signifikan, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap upaya Jakarta dalam mencapai target pengurangan sampah yang lebih ambisius di masa mendatang.

E. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan diperluas dengan pendekatan yang lebih inklusif, interaktif, dan berbasis teknologi. Penyebaran informasi

mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik tidak hanya akan dilakukan melalui media konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kampanye publik akan digencarkan melalui media sosial, aplikasi edukasi lingkungan, podcast bertema keberlanjutan, serta program televisi yang mengangkat kisah sukses dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan influencer lingkungan, komunitas peduli lingkungan, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang lebih persuasif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Kegiatan langsung di komunitas juga akan semakin diperbanyak, seperti lokakarya pemilahan sampah, pelatihan daur ulang, serta kompetisi inovasi pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R).

Edukasi berbasis sekolah dan perguruan tinggi juga akan diperkuat dengan integrasi materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum, baik dalam bentuk mata pelajaran khusus maupun proyek ekstrakurikuler yang melibatkan siswa secara aktif. Sekolah-sekolah akan didorong untuk menerapkan program “Sekolah Zero Waste” yang mengajarkan siswa tentang pemilahan sampah sejak dini, penggunaan kembali barang bekas, serta praktik pengomposan di lingkungan sekolah. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa akan diajak untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, serta mengembangkan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada solusi persampahan berbasis komunitas. Pada periode 2025-2026, target utama kegiatan KIE akan mencakup rumah tangga, industri, serta institusi pendidikan, dengan fokus pada praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Dalam sektor industri dan bisnis, perusahaan akan didorong untuk berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti mendukung sistem daur ulang atau menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan kerja mereka. Dengan adanya pelibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang signifikan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat mendukung pencapaian target akselerasi pengurangan sampah di DKI Jakarta secara lebih efektif dan berkelanjutan.

F. Kerjasama dan Kemitraan

Untuk mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pemerintah DKI Jakarta berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai sektor, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna menghadirkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam mengelola sampah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah lain akan difokuskan pada berbagi pengalaman dan penerapan kebijakan yang telah terbukti

berhasil dalam mengurangi timbulan sampah, meningkatkan efektivitas sistem pemilahan, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pengolahan sampah. Di sektor swasta, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah, manufaktur berkelanjutan, serta industri kreatif berbasis daur ulang akan didorong untuk berinvestasi dalam proyek pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga akan diajak untuk berkontribusi dalam riset dan pengembangan teknologi baru, termasuk penciptaan material alternatif yang lebih mudah terurai serta sistem pengolahan limbah berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi daur ulang.

Di tingkat internasional, kerja sama dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan sampah modern akan dijajaki lebih lanjut, baik dalam aspek transfer teknologi, pendanaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa negara yang memiliki pengalaman unggul dalam pengolahan sampah berbasis teknologi tinggi, seperti Jepang, Jerman, dan Swedia, dapat menjadi mitra dalam pengembangan fasilitas waste-to-energy (WTE) di Jakarta, yang memungkinkan konversi sampah menjadi energi listrik secara efisien. Selain itu, mekanisme pendanaan dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur persampahan yang lebih canggih dan berkelanjutan. Target dari berbagai inisiatif kolaboratif ini adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur pengolahan sampah, memperluas implementasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor, serta mendorong investasi yang lebih besar dalam industri daur ulang dan pengurangan sampah. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam periode 2025-2026, sehingga kota ini dapat menjadi model percontohan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

G. Pengawasan Pengelolaan Sampah

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah, strategi pengawasan akan diperketat dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta menerapkan sistem pemantauan yang lebih efektif dan berbasis teknologi. Pemerintah DKI Jakarta akan memperkuat sinergi antara dinas lingkungan hidup, aparat penegak hukum, serta pihak kecamatan dan kelurahan dalam mengawasi implementasi kebijakan persampahan di lapangan. Pengawasan akan difokuskan pada pencegahan berbagai praktik yang dapat merusak lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan di sungai, saluran air, dan lahan kosong, pembakaran terbuka (open burning) yang dapat

menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan, serta pembuangan ilegal (illegal dumping) oleh individu maupun industri yang tidak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi pemantauan, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan pembuangan sampah liar, penggunaan drone untuk mengawasi wilayah yang sulit dijangkau, serta penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara real-time.

Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme penegakan hukum guna memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi yang diberlakukan akan mencakup denda administratif bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, penutupan usaha bagi industri yang tidak mematuhi standar pengelolaan limbah, serta tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku bagi kasus pelanggaran berat. Selain itu, skema insentif dan disinsentif juga akan diterapkan, di mana individu atau entitas yang aktif dalam pengelolaan sampah yang baik akan mendapatkan penghargaan, insentif pajak, atau fasilitas tertentu, sementara mereka yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi yang lebih tegas. Pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi persampahan, baik melalui media sosial, kampanye publik, maupun program edukasi berbasis komunitas. Dengan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warga DKI Jakarta.

H. Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Untuk memastikan program akselerasi pengelolaan sampah berjalan sesuai target, estimasi anggaran telah dialokasikan secara proporsional untuk berbagai aspek yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur persampahan, kampanye edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi modern dalam pengolahan limbah. Pendanaan utama akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan dan modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang lebih efisien, serta pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah. Selain dana APBD, pemerintah juga membuka peluang tambahan dari berbagai sumber lain, termasuk dana hibah dari lembaga nasional maupun internasional, investasi dari sektor

swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP), serta dukungan dari organisasi internasional yang fokus pada keberlanjutan lingkungan.

Alokasi anggaran ini tidak hanya ditujukan untuk aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia dan insentif bagi masyarakat serta pelaku usaha yang berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah. Program edukasi dan kampanye kesadaran publik akan dibiayai melalui kombinasi dana APBD dan kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi rumah tangga yang aktif melakukan pemilahan sampah, komunitas yang mengelola bank sampah, serta industri yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam operasionalnya. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk riset dan pengembangan inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti penerapan teknologi waste-to-energy (WTE), peningkatan efisiensi sistem daur ulang, serta pengembangan material alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan perencanaan keuangan yang matang, transparan, dan berbasis kinerja, diharapkan akselerasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak nyata dalam pengurangan timbulan sampah, serta mencapai hasil yang optimal pada periode 2025-2026.

I. Rencana Kegiatan dan Target Pencapaian

Untuk memastikan pelaksanaan program akselerasi pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana, tahapan kegiatan pada periode 2025-2026 akan disusun secara sistematis dalam bentuk tabel. Rincian ini mencakup berbagai kegiatan utama, seperti pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, optimalisasi kebijakan, edukasi masyarakat, serta penguatan pengawasan dan kemitraan. Setiap kegiatan akan disertai dengan target capaian, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan yang terperinci. Penyusunan dalam format tabel bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sehingga progres dari setiap program dapat diukur dengan jelas. Dengan pendekatan ini, diharapkan Peta Jalan (*Roadmap*) akselerasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan hasil yang nyata sesuai dengan target yang telah ditetapkan (bisa dilihat pada lampiran)

tabel 3. 2. Rencana dan Target

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
1.		Konsultasi dengan	Januari	-	DLH bersama Indonesia

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
	Koordinasi Pelaksanaan & Implementasi <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan strategis dan tata kelola pengembangan Bank Sampah Induk. • Peningkatan kapasitas dan pelatihan operasional bagi personel BSU dan BSI. • Mobilisasi pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung operasional. • Koordinasi pemangku kepentingan dengan DLH, ASOBSI, ADUPI, dan pelaku industri. • Pemantauan, evaluasi, dan penilaian dampak sesuai regulasi EPR. 	pemangku kepentingan, pengembangan kerangka kerja			Packaging Recovery Organization (IPRO)
		Finalisasi draf tata kelola & strategi	Februari	-	
		Finalisasi SOP	Maret	-	
		Mobilisasi infrastruktur untuk Bank Sampah Induk	April	-	
		Evaluasi tantangan implementasi awal	Mei	-	
		Pelatihan skala penuh untuk BSU/BSI	Juni	-	
		Pemantauan & validasi data aliran sampah	Juli	-	
		Penilaian strategis & laporan jangka menengah	Agustus	-	
		Penyempurnaan kerangka operasional untuk skala lebih besar	Sep	-	
		Penyerahan laporan evaluasi akhir	Oktober	-	
	Sosialisasi model tata kelola untuk replikasi	Nov	-		

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Monitoring dan pendampingan pasca-replikasi	Des	-	
2.	Koordinasi Digital & Operasional <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi dan pengelolaan sistem POP untuk pelacakan sampah dan pemantauan data real-time. • Menjaga integritas dan transparansi data untuk pengambilan keputusan berbasis data. • Dukungan teknis dan peningkatan kapasitas BSU/BSI dalam adopsi alat pelacakan digital. • Penyempurnaan sistem secara berkelanjutan berdasarkan masukan dan kebutuhan operasional. 	Penilaian teknis sistem POP	Januari	-	DLH Bersama SIRSAK
Pembuatan prototipe sistem & uji integrasi		Februari	-		
Pelatihan BSU/BSI tentang sistem POP		Maret	-		
Penerapan sistem & pemantauan langsung dimulai		April	-		
Penyesuaian teknis sistem POP		Mei	-		
Skalabilitas sistem POP & peningkatan akurasi data		Juni	-		
Analisis efisiensi sistem & perbaikan kesalahan		Juli	-		
Implementasi wawasan berbasis AI dalam data sampah		Agustus	-		
Peningkatan aksesibilitas pengguna terhadap sistem POP		Sep	-		
Pengembangan roadmap perbaikan berkelanjutan		Oktober	-		

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Sosialisasi dan Pengembangan Skala Provinsi	Nov	-	
		Monitoring Akhir dan Penyerahan Laporan	Des	-	
3.	<p>Integrasi dengan Industri Daur Ulang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penyerapan material daur ulang ke industri daur ulang. • Memfasilitasi solusi logistik dan transportasi untuk pergerakan sampah yang efisien. • Memperluas peluang pasar untuk bahan daur ulang guna memastikan keberlanjutan jangka panjang. 	Konsultasi industri untuk target daur ulang	Januari	-	DLH bersama Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Indonesian Plastics Recyclers (IPR)
		Perencanaan logistik dan transportasi	Februari	-	
		Kesiapan infrastruktur logistik	Maret	-	
		Uji coba batch pertama material daur ulang	April	-	
		Penyesuaian strategi daur ulang berdasarkan sampah terkumpul	Mei	-	
		Ekspansi mitra industri untuk daur ulang	Juni	-	
		Optimalisasi operasi transportasi	Juli	-	
		Penetapan KPI untuk volume daur ulang	Agustus	-	
		Finalisasi peta jalan ekspansi industri	Sep	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Optimalisasi struktur logistik akhir	Oktober	-	
		Pengembangan Sistem Digital untuk Manajemen Daur Ulang	Nov	-	
		Monitoring Akhir dan Evaluasi Program	Des	-	
4.	<p>Standarisasi dan Penguatan Kapasitas Bank Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan standar operasional dan protokol tata kelola bagi bank sampah. • Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan efisiensi unit Bank Sampah. • Memfasilitasi kolaborasi dan jejaring antara BSI, BSU, dan mitra sektor swasta. 	Sosialisasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait tata kelola Bank Sampah.	Januari	-	DLH Bersama Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI)
		Koordinasi dengan BSI/BSU untuk penilaian tata kelola dasar	Februari	-	
		Pengembangan materi pelatihan untuk BSU/BSI	Maret	-	
		Memulai pelatihan kapasitas tata kelola	April	-	
		Pelatihan penguatan kapasitas	Mei	-	
		Penilaian dan audit tata kelola lebih lanjut	Juni	-	
		Finalisasi model tata kelola Bank Sampah	Juli	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Validasi BSU yang telah terlatih untuk kepatuhan standar	Agustus	-	
		Publikasi laporan efektivitas tata kelola	Sep	-	
		Evaluasi pelatihan akhir & sertifikasi	Oktober	-	
		Usulan replikasi tata kelola untuk BSI baru	Nov	-	
		Monitoring dan pendampingan lanjutan bagi BSU/BSI pasca-pelatihan.	Des	-	
5.	<p>Pengawasan Kebijakan dan Dukungan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah di Jakarta. • Memberikan dukungan logistik dan transportasi untuk menjembatani kesenjangan pengumpulan sampah. • Memperkuat program keterlibatan publik dalam pemilahan dan daur ulang sampah. 	Tinjauan kepatuhan terhadap Pergub 33/2021	Januari	-	DLH
		Penyelarasan dukungan regulasi dengan rencana eksekusi	Februari	-	
		Advokasi kebijakan & peningkatan kesadaran publik	Maret	-	
		Dukungan logistik transportasi	April	-	
		Pemantauan penegakan aturan pemilahan	Mei	-	
		Memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta	Juni	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Perluasan edukasi publik	Juli	-	
		Penegakan kepatuhan untuk pengumpulan yang lebih baik	Agustus	-	
		Finalisasi rekomendasi kebijakan & institusionalisasi	Sep	-	
		Program institusionalisasi sebagai tolok ukur kebijakan	Oktober	-	
		Pengembangan Sistem Digital untuk Monitoring Sampah	Nov	-	
		Evaluasi Akhir dan Penyusunan Rencana Kerja 2026	Des	-	
6.	Koordinator Wilayah <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana kerja Pengelolaan Sampah berdasarkan musyawarah RW Mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak atau motor sampah kepada Lurah Mengusulkan pengadaan wadah Sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu, sarana Pengumpulan Sampah, dan Pengolahan Sampah kepada Lurah 	Menyusun rencana kerja pengelolaan sampah berdasarkan musyawarah RW.	Januari	-	DLH Bersama Badan Pengelolaan Sampah RW (BPS-RW)
		Mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak/motor sampah kepada Lurah.	Februari	-	
		Mengusulkan pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga tidak mampu serta	Maret	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di masing masing rumah tangga. Memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan Sampah liar. Melakukan kegiatan Pengolahan Sampah di RW dan pengangkutan Residu Sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R. Mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah lainnya di lingkungan RW kepada Lurah. Menyiapkan petugas untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah. Melaporkan kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada Lurah dalam hal adanya tumpukan Sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk dilakukan pembersihan; dan Melaporkan pelaku penumpukan Sampah, pembuangan Sampah liar dan pembakaran Sampah secara terbuka kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada Lurah disertai dengan bukti pendukung. 	sarana pengumpulan dan pengolahan sampah kepada Lurah.			
		Menjamin terwujudnya pemilahan sampah di setiap rumah tangga melalui sosialisasi dan pendampingan.	April	-	
		Memastikan kebersihan lingkungan dan mencegah pembuangan sampah liar melalui patroli dan pengawasan rutin.	Mei	-	
		Melaksanakan kegiatan pengolahan sampah di RW, seperti daur ulang dan kompos, serta mengoptimalkan pengangkutan residu sampah ke TPS/TPS 3R.	Juni	-	
		Mengusulkan kebutuhan tambahan prasarana dan sarana pengelolaan sampah lainnya di lingkungan RW kepada Lurah.	Juli	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Menyiapkan dan melatih petugas untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih efektif.	Agustus	-	
		Melaporkan adanya tumpukan sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum kepada Ketua RW untuk diteruskan ke Lurah.	Sep	-	
		Melaporkan pelaku penumpukan, pembuangan sampah liar, dan pembakaran sampah secara terbuka kepada Ketua RW dengan bukti pendukung.	Oktober	-	
		Mengevaluasi efektivitas program pengelolaan sampah yang telah berjalan selama setahun.	Nov	-	
		Menyusun rekomendasi dan rencana kerja tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.	Des	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dalam Pengelolaan Sampah. • Menimbang dan mencatat setiap transaksi Nasabah dan/ atau masyarakat. • Menginformasikan harga sampah ke Nasabah dan/ atau masyarakat. • Menyetorkan sampah dari Nasabah dan/atau masyarakat ke BSI. • Mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan BSU. • Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BSI. • Melaporkan data Pengelolaan Sampahnya ke BSI dan Dinas. • Menjadikan BSU sebagai unit kegiatan ekonomi produktif. • Melakukan kemitraan dengan pihak lain. 	Sosialisasi Bank Sampah Unit kepada Warga dan Nasabah	Januari	-	DLH bersama Bank Sampah Unit (BSU)
		Menimbang dan Mencatat Setiap Transaksi Nasabah	Februari	-	
		Menginformasikan Harga Sampah kepada Nasabah	Maret	-	
		Mengajak Masyarakat untuk Aktif dalam Kegiatan BSU	April	-	
		Menyetorkan Sampah dari Nasabah ke Bank Sampah Induk (BSI)	Mei	-	
		Melaporkan Data Pengelolaan Sampah ke BSI dan Dinas Lingkungan Hidup	Juni	-	
		Memperkuat Kerja Sama dan Koordinasi dengan Bank Sampah Induk (BSI)	Juli	-	
		Menjadikan BSU sebagai Unit Kegiatan Ekonomi Produktif	Agustus	-	
		Melakukan Kemitraan dengan Pihak Lain	Sep	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Pemantauan dan Evaluasi Kinerja BSU	Oktober	-	
		Edukasi Lanjutan kepada Masyarakat tentang Daur Ulang	Nov	-	
		Finalisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya	Des	-	
8.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembelian sampah anorganik yang sudah terpilah dari BSU. Melaksanakan penjemputan sampah BSU. Mendorong perkembangan BSU menjadi lebih cepat melalui pembinaan teknis dan pendampingan, peningkatan kapasitas teknis dan manajemen, melaksanakan evaluasi kinerja, dan menjaga keberlanjutan BSU. Mengembangkan pelaksanaan transaksi berbasis non tunai. Menjaga stabilitas harga. Mencatat dan melaporkan jumlah sampah yang terkelola dan residunya ke dalam log book (data terkait reduksi, daur ulang, dan penggunaan kembali 	Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah	Januari	-	DLH Bersama Bank Sampah Induk (BSI)
		Melaksanakan Pembelian Sampah Anorganik dari BSU	Februari	-	
		Penjemputan Sampah dari BSU	Maret	-	
		Pembinaan dan Pendampingan BSU	April	-	
		Pengembangan Transaksi Berbasis Non-Tunai	Mei	-	
		Menjaga Stabilitas Harga Sampah	Juni	-	
		Pencatatan dan Pelaporan Data Sampah	Juli	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
	<p>sampah dari BSU) ke Dinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadi sentra edukasi dan sosialisasi Pengelolaan Sampah. Menjadi sentra bisnis yang dapat membantu meningkatkan nilai ekonomis pada masyarakat, dan Melakukan kerja sama dengan industri daur ulang dan/atau pemanfaat lain. 	<p>Penguatan Sentra Bisnis Bank Sampah</p> <p>Kerja Sama dengan Industri Daur Ulang</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Program</p> <p>Penguatan Edukasi Masyarakat</p> <p>Finalisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Depan</p>	<p>Agustus</p> <p>Sep</p> <p>Oktober</p> <p>Nov</p> <p>Des</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
9.	<p>Koordinator Pengembangan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun program edukasi dan kampanye publik. Mendukung pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Membantu koordinasi antar-pemangku kepentingan. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah. Menggalang dana dan sumber daya untuk pengelolaan sampah. Memperkenalkan praktik terbaik pengelolaan sampah. 	<p>Penyusunan Program Edukasi dan Kampanye Publik</p> <p>Peningkatan Kesadaran Masyarakat</p> <p>Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah</p> <p>Mendorong Bank Sampah dan Pengelolaan Berbasis Komunitas</p> <p>Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah</p> <p>Kolaborasi dengan Sektor Swasta</p>	<p>Januari</p> <p>Februari</p> <p>Maret</p> <p>April</p> <p>Mei</p> <p>Juni</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	DLH Bersama World Wide Fund for Nature (WWF)

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Penguatan Sistem Daur Ulang dan Pengelolaan Sampah Organik	Juli	-	
		Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Sampah	Agustus	-	
		Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Sampah	Sep	-	
		Penguatan Kapasitas SDM dan Relawan	Oktober	-	
		Penggalangan Dana dan Sumber Daya	Nov	-	
		Finalisasi Program dan Penyusunan Rencana Tahun Berikutnya	Des	-	
10.	Koordinator Pengelolaan Sampah Organik	Konsolidasi & Perencanaan Program	Januari	-	DLH Bersama Biomagg
	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem pengelolaan sampah organik berbasis biokonversi (larva Black Soldier Fly/BSF). 	Pengembangan Standar & Pedoman Teknis	Februari	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah organik. 	Penguatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Organik	Maret	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah organik. 	Pemetaan dan Pengelolaan Kemitraan dengan Unit Pengolahan	April	-	
		Edukasi dan Kampanye	Mei	-	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengolahan sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi (pakan ternak, pupuk). • Melakukan penelitian dan inovasi dalam teknologi pengolahan sampah organik. • Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha pengolahan sampah organik. • Memonitor dan mengevaluasi dampak program pengelolaan sampah organik terhadap lingkungan. 	Kesadaran Masyarakat			
		Implementasi Skala Penuh Program Pengumpulan Sampah Organik	Juni	-	
		Pengelolaan Dana Hibah dan Investasi Program	Juli	-	
		Peningkatan Kapasitas & Penguatan Sumber Daya Manusia	Agustus	-	
		Kemitraan dengan Industri Daur Ulang & Pemanfaatan Hasil	Sep	-	
		Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pengolahan	Oktober	-	
		Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Program	Nov	-	
		Penyusunan Laporan Akhir dan Perencanaan Tahun Berikutnya	Des	-	
11.		Pengelolaan Sampah oleh Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPS-RW)	Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Bidang Pengelolaan	Jan – Des	-

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Sampah lingkup RW kepada Lurah			
		Melaporkan secara berjenjang kepada Camat yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Walikota/ Bupati dengan tembusan Suku Dinas Lingkungan Hidup	Jan – Des	-	Rukun Warga (RW)
		Melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW (BPS-RW)	Jan – Des	-	Kelurahan
		Memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.	Jan – Des	-	Kelurahan
		Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban RW terkait pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh BPS-RW kepada Camat.	Jan – Des	-	Kelurahan

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pengawasan Pengelolaan Sampah di Lingkup RW.	Jan – Des	-	Kecamatan
		Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari Lurah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Wilayah RW kepada Walikota/Bupati.	Jan – Des	-	Kecamatan
		Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW	Jan – Des	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup
		Memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW.	Jan – Des	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		Walikota/Bupati melalui Camat dan Lurah berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya kegiatan Pengelolaan Sampah lingkup RW.	Jan – Des	-	Kota/ Kabupaten
		Menerima Laporan pertanggungjawaban dari Camat terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah RW yang disampaikan oleh Lurah dan Ketua RW.	Jan – Des	-	Kota/ Kabupaten
12.	Melakukan Pengembangan bank sampah menjadi bisnis sosial	Mengembangkan Bank Sampah menjadi Bisnis Sosial	-	Januari	DLH
		Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan Sampah	-	April	DLH
		Memfasilitasi akses pasar bagi produk Bank Sampah (<i>business matching</i>)	-	Jul – Des	DLH
13.	Melakukan pengurangan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui	Menggunakan Produksi hasil Peternakan sebagai Menu	-	Januari	DLH

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
	pengembangan Bio Konversi Maggot (BSF) dan Komposting	dari Makan Bergizi Gratis			
14.	Melakukan penerapan prinsip <i>extended procedure responsibility</i>	Pelaksanaan dan Monitoring penerapan prinsip <i>extended procedure responsibility</i>	-	Jan – Des	DLH
15.	Melakukan peningkatan untuk Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	Menetapkan indikator kinerja lingkungan (KPI) untuk memantau kemajuan secara berkala.	-	Januari	DLH
		Melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil monitoring	-	Jan – Des	DLH
16.	Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah	Melakukan pendataan menyeluruh untuk mengidentifikasi kebutuhan Jafung PELHI dan pendidik lingkungan, lalu menyediakan pelatihan, sarana prasarana, serta dukungan kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi mereka di setiap daerah	-	Jan – Jun	DLH

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
17.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala	Menyelenggarakan pelatihan rutin, workshop, dan sertifikasi untuk penyuluh, serta memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur peningkatan kompetensi dan efektivitas penyuluhan	-	Jul – Des	DLH
18.	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing	Memperluas dan meningkatkan jumlah sekolah Adiwiyata	-	Jan – Jun	DLH
19	Melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar	Melakukan monitoring secara berkala pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantor Pemerintah DKI Jakarta	-	Jan – Des	DLH
20.	Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	Pelibatan Tokoh Masyarakat pegiat lingkungan yang sudah mendapatkan penghargaan (Kalpataru, Proklam, Bank Sampah, dsb) dan LSM lingkungan dalam pelaksanaan edukasi pengelolaan	-	Jul – Des	

NO	KEGIATAN	Strategi	TARGET		OPD Pelaksana
			2025	2026	
		sampah ke masyarakat, komunitas, sekolah, kegiatan usaha.			

J. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Program Makan Siang Gratis

Program Makan Siang Gratis (MBG) yang dijalankan di DKI Jakarta tidak hanya bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang dihasilkan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Setiap hari, ribuan porsi makanan disiapkan dan didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang berpotensi menghasilkan limbah makanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar limbah dari program ini tidak berkontribusi pada peningkatan volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pengurangan sampah sejak dari sumbernya, yaitu dengan perencanaan menu yang cermat, penyusunan porsi makanan yang tepat untuk meminimalisir sisa makanan, serta edukasi kepada penerima manfaat agar lebih bijak dalam mengonsumsi makanan yang diberikan.

Selain upaya pengurangan di hulu, program MBG juga akan mengoptimalkan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang terdiri dari sisa makanan dan bahan baku dapur akan dipisahkan secara langsung di dapur MBG sebelum dibuang, sehingga memudahkan proses pengolahan lebih lanjut. Sementara itu, sampah anorganik seperti kemasan makanan dan botol plastik akan dikumpulkan untuk didaur ulang melalui kerja sama dengan bank sampah dan industri pengolahan limbah. Pengelolaan sampah organik akan difokuskan pada penerapan teknologi yang ramah lingkungan, seperti composting dan biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF). Limbah makanan yang masih layak juga akan dipertimbangkan untuk didistribusikan kembali dalam bentuk program food rescue, guna mengurangi jumlah makanan yang terbuang percuma dan membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Penerapan strategi ini membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pengelola dapur MBG, tenaga pengolah makanan, serta masyarakat penerima manfaat. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah akan diberikan secara berkala, agar setiap pihak yang terlibat memiliki

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah dalam program MBG, termasuk kewajiban bagi dapur penyedia makanan untuk menerapkan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, sistem pemantauan berbasis teknologi akan dikembangkan untuk memastikan implementasi pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, program Makan Siang Gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi contoh model program yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi beban sampah di DKI Jakarta, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah daerah DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam peta jalan akselerasi pengelolaan sampah 2025-2026. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang mencakup peningkatan efektivitas sistem pengelolaan sampah, penguatan regulasi, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah menyadari bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan sistematis, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, regulasi terkait pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah akan diperkuat guna memastikan bahwa setiap sektor, baik masyarakat maupun dunia usaha, memiliki peran aktif dalam mendukung upaya ini.

Selain penguatan kebijakan, pemerintah juga akan mendorong inovasi dalam pengolahan sampah agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Teknologi pengolahan sampah modern, seperti sistem waste-to-energy (WTE), pengomposan skala besar, serta pengolahan sampah organik dengan metode biokonversi, akan terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam sistem pengelolaan sampah kota. Dalam rangka mendukung implementasi program-program ini, pemerintah akan memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan berkelanjutan, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional.

Pesan utama yang ingin disampaikan melalui peta jalan akselerasi ini adalah bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga proses pengolahan di hilir dapat berjalan lebih efisien. Kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Di sisi lain, sektor swasta juga dapat memberikan kontribusi signifikan melalui inovasi teknologi serta investasi dalam industri pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular, di mana limbah dapat diolah kembali menjadi bahan baku yang memiliki nilai ekonomi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, target pengurangan sampah ke TPA dapat tercapai, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

No	Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab	Rencana Kerja	2025																																															
				Q1												Q2												Q3												Q4											
				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
				M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4
		n tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW <ul style="list-style-type: none"> Memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW. 																																																	
15	Kota/Kabupaten	Penanggung Jawab Utama <ul style="list-style-type: none"> Walikota/Bupati melalui Camat dan Lurah berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya kegiatan Pengelolaan Sampah lingkup RW. Menerima Laporan pertanggungjaban dari Camat terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah RW yang disampaikan oleh Lurah dan Ketua RW. 																																																	



Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta